

**PERBANDINGAN KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN WAJIB
LAPORAN KEUANGAN KOPERASI DI KABUPATEN OKU
TAHUN 2008 DENGAN 2009**

ABSTRACT

This study aims to determine completeness level and differences in completeness of financial statements mandatory disclosure of KPRI (government employee cooperation) at District of OKU in 2008 and 2009.

This study uses purposive sampling method with requirement those cooperations submit RAT (annual member meeting) report to the Department of Industry at OKU district. RAT reports of KPRI for 2008 and 2009 available in the Department of Industry amount to 15 (fifteen) units.

The variable in this study is the completeness level of mandatory disclosure of KPRI financial statements at Department of Industry in 2008 to 2009 which is based on criteria as follows: Balance Sheet which includes current assets, long-term investments, fixed assets, other assets, current liabilities, long-term liabilities, and equity; Calculation of operation results that includes participation of members, revenues from non-members, and operating expenses; Cash flow statement includes cash flows from operating activities, cash flows from investing activities, and cash flow from financing activities; Member economic promotion report which includes economic benefits from the purchase/procurement of shared services, economic benefits of joint management, economic benefits from saving and loan via cooperation, and economic benefits in the form of SHU; Notes to the financial statements includes the accounting treatment, and disclosure of other information. Data collection methods used in this study are observation, documentation, and interview. The analytical method used is descriptive percentage.

The result of this study shows that the average completeness level of financial statements mandatory disclosure of cooperation listed in Department of Industry at OKU Regency in 2008 is only 29.84%, and in 2009 is 35.30%. In 2008, the highest disclosure of items in the category of

saving and loan cooperation is Wahana Niaga cooperation at 39.34% and the lowest is Bappeda cooperation of 16.39%. The highest Disclosure of items in the category of saving and loan cooperation and multi purpose cooperation (Waserda) is Tunas Baru cooperation of 40.98% and the lowest is 21.31% which is Melati cooperation. In 2009, the highest disclosure of items in the category of saving and loan cooperation is Bina Sejahtera cooperation at 40.98% and the lowest is 19.67% which is Bappeda cooperation. For the category of saving and loan and multi purpose cooperation, the highest disclosure is 47.54% (Sumber Gizi cooperation) and the lowest is Melati cooperation of 26.23%.

Result also shows that differences in the level of disclosure completeness are caused by the disclosure of components and items which is based solely on the performing activities and lack of information and insight in expressing the items in Financial Statements. In addition, the cooperations which are financially strong and audited by Public Accounting Firm (KAP) will disclose more information than those of financially weak and not audited by KAP cooperations.

Keywords: Mandatory Disclosure, Government Employee Cooperation (KPRI), SFAS No. 27 year 2009

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2009) dalam PSAK No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian, dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah suatu badan usaha koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggotanya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan

suatu informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Salah satu informasi yang bermanfaat bagi pemakai adalah informasi yang dihasilkan oleh akuntansi.

Menurut Chariri dan Ghozali (2003:247) informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan tentang informasi yang diharuskan oleh peraturan yang telah ditetapkan oleh badan otoriter (SAK oleh IAI). Pengungkapan sukarela adalah informasi yang tidak diwajibkan oleh suatu peraturan yang berlaku, tetapi diungkapkan karena dipandang relevan dengan kebutuhan pemakai tahunan.

Pengungkapan wajib laporan keuangan di Indonesia ditetapkan oleh IAI dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dalam hal ini PSAK No. 27 Tahun 2009 tentang akuntansi perkoperasian yang berisi pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan koperasi. Kriteria kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan menurut PSAK No. 27 Tahun 2009 terdapat 61 item diungkapkan dalam laporan keuangan

Berlakunya PSAK No. 27 tentang perkoperasian tersebut, ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh KPRI yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU, hal ini dibuktikan berdasarkan hasil *survey* sementara, rata-rata kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan tahun 2007 sebesar **26.01%**.

Berdasarkan uraian tersebut di muka, menjadikan peneliti termotivasi untuk meneliti tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU tahun 2008 dengan tahun 2009. Dalam hal ini Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU merupakan badan usaha yang tidak semata-mata berorientasi pada laba (*profit oriented*), melainkan juga pada aspek manfaat (*benefit oriented*). Koperasi diharapkan memiliki kemampuan dalam mengelola berbagai informasi khususnya pengungkapan informasi akuntansi, sehingga manajemen atau pengurus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan seksama.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian yang mendalam pada bidang perkoperasian di Indonesia, terutama mengenai kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan. Adapun objek penelitian ini adalah KPRI yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU, alasan peneliti mengambil objek penelitian KPRI adalah dilihat dari kesamaan jenis koperasinya, yang berjumlah 65

koperasi terdiri dari 58 koperasi aktif dan 7 koperasi yang tidak aktif, dari jumlah koperasi yang aktif diambillah koperasi yang menyerahkan laporan RAT ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU dari tahun 2007 sampai 2009 sebagai populasinya. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kelengkapan dan penyebab perbedaan pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU tahun 2008 dengan tahun 2009. Alasan peneliti menggunakan data laporan keuangan tahun 2008 dengan 2009 adalah Data tersebut merupakan data laporan keuangan dua tahun terakhir di tahun 2010, peneliti ingin melihat apakah dari sudah lamanya ditetapkan PSAK No 27 akan berkemungkinan pengungkapan wajib akan lengkap sesuai ketentuan pada PSAK No 27 tahun 2009. Berdasarkan fakta dan hasil penelitian di atas, maka penelitian ini berjudul “Perbandingan Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi di Kabupaten OKU Tahun 2008 Dengan 2009”.

Rumusan Masalah Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI di Kabupaten OKU tahun 2008 dengan tahun 2009?
2. Apakah penyebab perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI di Kabupaten OKU tahun 2008 dengan tahun 2009?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI pada tahun 2008 dan tahun 2009.
2. Penyebab perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI di Kabupaten OKU tahun 2008 dengan tahun 2009.

TINJAUAN PUSTAKA

Standar akuntansi dapat dikatakan sebagai pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu, yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu, berisi tentang definisi, pengukuran atau penilaian, pengakuan dan pengungkapan elemen laporan keuangan. Oleh karena standar akuntansi merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang, maka standar akuntansi adalah bagian dari prinsip akuntansi berterima umum. Standar akuntansi memberikan aturan-aturan umum yang bersifat praktis untuk membantu pekerjaan akuntan (Chariri dan Ghazali, 2003:122)

Kaitannya dengan akuntansi perkoperasian, standar akuntansi keuangan merupakan prosedur, metode dan teknik akuntansi yang mengatur proses penyusunan laporan keuangan koperasi sebagai laporan pertanggungjawaban pengurus terhadap anggota koperasi.

Kelengkapan adalah suatu bentuk kualitas. Menurut Imhoff dalam Na'im dan Rakhman (2000), kualitas tampak sebagai atribut-atribut yang penting dari suatu informasi akuntansi, banyak penelitian yang mengemukakan bahwa kualitas pengungkapan dapat diukur dan digunakan untuk menilai manfaat potensial dari isi suatu laporan keuangan tahunan.

Kelengkapan dan keterbukaan pengungkapan laporan keuangan sangat penting karena laporan keuangan merupakan sumber utama informasi keuangan yang disampaikan oleh manajemen (pengurus). Menurut Chariri dan Ghazali (2003: 247) pengungkapan (*disclosure*) dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu :

1. Pengungkapan Wajib (*mandatory disclosure*)
2. Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*)

Chariri dan Ghazali (2003: 235) mengemukakan ada tiga konsep mengenai luas pengungkapan laporan keuangan, yaitu :

- a. Pengungkapan yang cukup (*adequate disclosure*)
- b. Pengungkapan yang wajar (*fair disclosure*)
- c. Pengungkapan yang lengkap (*full disclosure*)

pengungkapan yang tepat mengenai informasi yang penting bagi para pengguna laporan keuangan koperasi, hendaknya bersifat cukup, wajar, dan lengkap.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ho dan Wong (2000) dalam Mintara (2008) menunjukkan bahwa Indonesia, Thailand dan Jepang mempunyai tingkat transparansi yang rendah, dan merupakan negara yang mengalami *volatile shocks* (rentan dengan perubahan) yang lebih besar dibandingkan dengan negara yang mempunyai transparansi yang lebih tinggi (Hongkong, Singapura dan Taiwan).

Penelitian tentang pengungkapan dalam laporan tahunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya merupakan hal yang penting dilakukan. Di mana hasil penelitian diharapkan akan memberikan gambaran mengenai sifat perbedaan pengungkapan antara perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dapat memberikan petunjuk tentang kondisi perusahaan pada suatu masa pelaporan. Dalam pencapaian efisiensi dan sebagai sarana akuntabilitas publik, pengungkapan laporan keuangan menjadi faktor yang signifikan (Almilia dan Retrinasari, 2007).

Beberapa penelitian empiris terdahulu menunjukkan bahwa karakteristik-karakteristik perusahaan yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan meliputi : (1) Rasio leverage suatu perusahaan (Ainun Na'im dan Fuad Rakhman, 2000). Schipper (1981) dalam Marwata (2001) menyatakan bahwa semakin tinggi rasio leverage maka akan menyediakan informasi secara lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan kreditur jangka panjang. (2) Size perusahaan (Fitriani, 2001). Penelitian Fitriani (2001) menyatakan bahwa variabel size perusahaan mempengaruhi kelengkapan pengungkapan. Cooke (1989) dalam Fitriani (2001) Semakin besar size suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pengungkapannya. (3) Rasio Likuiditas (Edy subiyantoro, 1996) dalam Fitriani (2001). Cooke (1989) dalam Fitriani (2001) menyatakan bahwa kondisi perusahaan yang sehat, yang antara lain ditunjukkan dengan tingkat likuiditas yang tinggi, berhubungan dengan pengungkapan yang lebih luas. (4) Net Profit Margin (Fitriani, 2001). Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa net profit margin mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan publik. Singvi dan Desai (1989) dalam Binsar H.Simanjuntak dan Lusy Widiastuti (2004) mengutarakan bahwa rentabilitas ekonomi dan profit margin yang tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang terinci. (5) Status Perusahaan (Fitriani, 2001). Dalam penelitiannya membuktikan bahwa variabel status perusahaan mempengaruhi kelengkapan pengungkapan.

Permana.L (2007) meneliti Studi Komparatif tentang kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi yang terdaftar di DINKOP dan UKM Kabupaten Semarang antara tahun 2004 dengan 2005. Dalam penelitian ini membuktikan bahwa rendahnya kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan pada dasarnya disebabkan

oleh pengungkapan item komponen laporan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan IAI dalam PSAK No. 27 tahun 1999, kemudian koperasi yang memiliki tingkat kelengkapan tinggi cenderung koperasi yang diaudit oleh KAP.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada tingkat kelengkapan dan penyebab perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan pada koperasi di OKU untuk tahun 2008 dengan 2009, hal inilah yang akan peneliti kaji lebih dalam, dengan alasan mengingat PSAK NO 27 sudah lama ditetapkan di Indonesia, tapi pada kenyataannya setelah peneliti survei kelengkapan ternyata tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi untuk tahun 2007 rendah dengan rata-rata skor persentasenya 26,01% dan rata-rata total skor 15,87.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah KPRI yang aktif dan terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU yang berjumlah 58 (lima puluh delapan) koperasi.

Penelitian ini hanya meneliti KPRI yang menyerahkan laporan RAT ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* (Marzuki, 2002:45).

Jumlah seluruh Laporan Rapat Anggota Tahunan KPRI tahun 2008 dan 2009 yang terdapat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU berjumlah 15 (lima belas) Koperasi.

Adapun daftar 15 (lima belas) KPRI pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU, yaitu:

Tabel 1. Daftar KPRI pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU

No.	NAMA KOPERASI	INSTANSI
1	BAPPEDA	BAPPEDA
2	BIDUK KENCANA	BKKBN
3	BINA MANDIRI	DIKNAS KEMILING
4	BINA SEJAHTERA	PENGADILAN AGAMA
5	BONITA	DINAS PERIKANAN
6	EMPAT SERASAN	DINAS TENAGA KERJA
7	KARYA AGUNG	DINAS KEBERSIHAN
8	KARYA HUSADA	DINAS KESEHATAN
9	KARYA SEJAHTERA	SMK NEGERI 1
10	MELATI	SMK NEGERI 2
11	PRIMKOJAK	KEJAKSAAN
12	SEHATI	SMP NEGERI 1
13	SUMBER GIZI	DINAS PETERNAKAN
14	TUNAS BARU	SMK NEGERI 3
15	WAHANA NIAGA	DINAS PERDAGANGAN

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU

Dalam penelitian ini pada dasarnya membandingkan antara variabel yang sejenis. Variabel dalam penelitian ini adalah kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU tahun 2008 dengan 2009 yang berjumlah 61 item (lihat lampiran).

Data primer yang digunakan berupa pertanyaan untuk mengetahui penyebab perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan tahun 2008 dengan tahun 2009. Data sekunder yang digunakan berupa laporan tahunan yang ada pada KPRI di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU tahun 2008 - 2009.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: observasi, dokumentasi, *interview*.

Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini pada dasarnya membandingkan antara variabel yang sejenis.

Variabel dalam penelitian ini adalah kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan. Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan merupakan pengungkapan minimum tentang informasi akuntansi yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan kelengkapan adalah suatu bentuk kualitas dari informasi akuntansi. Dari Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tahun 2009 tentang Koperasi terdapat 61 item yang minimum diungkapkan dalam laporan keuangan.

Variabel dalam penelitian ini adalah kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU tahun 2008 dengan 2009 yang didasarkan pada kriteria berjumlah 61 item.

Metode Analisis

1. Untuk mengukur kelengkapan pengungkapan dapat dinyatakan dalam bentuk Indeks Kelengkapan Pengungkapan, dimana perhitungan indeks kelengkapan pengungkapan dilakukan sebagai berikut :
 - a. Memberi skor untuk setiap item pengungkapan secara dikotomi, dimana jika suatu item diungkapkan diberi nilai satu dan jika tidak diungkapkan akan diberi nilai nol.
 - b. Skor yang diperoleh setiap perusahaan dijumlahkan untuk mendapatkan skor total.
 - c. Menghitung indeks kelengkapan pengungkapan dengan cara membagi total skor yang diperoleh dengan total skor yang diharapkan dapat diperoleh oleh perusahaan/koperasi.

Semakin banyak butir yang diungkap oleh perusahaan, semakin banyak pula angka indeks yang diperoleh perusahaan/koperasi tersebut. Perusahaan/koperasi dengan angka indeks yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan/koperasi tersebut melakukan praktek pengungkapan secara lebih komprehensif dibanding perusahaan/koperasi lain.

Menurut Nugraheni dkk, (2002 : 80) Dalam upaya untuk mengukur keluasan kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan dapat digunakan rumus deskriptif persentase sebagai berikut:

$$\text{Indeks Wallace} = \frac{n}{k} \times 100\%$$

Dimana, n : jumlah butir yang diungkapkan oleh perusahaan/koperasi

k : jumlah butir yang seharusnya diungkap

2. Tujuan penelitian yang kedua adalah ingin mengetahui penyebab perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib pada KPRI di kabupaten OKU tahun 2008 dengan tahun 2009, untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan kelengkapan pengungkapan wajib pada KPRI di kabupaten OKU tahun 2008 dengan tahun 2009, peneliti melakukan interview dengan para pengurus koperasi, dengan point-point sebagai berikut :
 - a. Komponen Laporan Keuangan Koperasi.
 - b. Pedoman dalam menyusun Laporan Keuangan Koperasi.
 - c. Pedoman untuk mengklasifikasikan item-item Akun dalam menyusun Laporan Keuangan Koperasi.
 - d. Jenis Usaha yang dikelola koperasi.
 - e. Perubahan usaha yang terjadi selama tahun 2007 sampai dengan 2009.
 - f. Pihak yang bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Koperasi.
 - g. Pelatihan - pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan koperasi secara lengkap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Koperasi, yang diadakan oleh Dinas Perindustriaan, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU.
 - h. Kerjasama Koperasi dengan pihak Koperasi Akuntan Publik (KAP) dalam memperoleh keterampilan dibidang manajemen keuangan, manajemen perkoperasian, untuk meningkatkan kualitas kelengkapan laporan keuangan koperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Karakteristik Koperasi di Kab. Ogan Komering Ulu (OKU)

Koperasi yang menjadi objek penelitian ini terdiri dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU yang berjumlah 15 koperasi. Ke-15 koperasi tersebut terdiri dari Bappeda, BKKBN, Pengadilan Agama, Dinas Perikanan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan, Kejaksaan, Dinas Peternakan, Dinas Perdagangan, dan 5 dari Dinas Pendidikan.

Perangkat Organisasi Koperasi di Kab. OKU

Suatu badan usaha dibentuk melalui organisasi yang merupakan suatu kerja sama yang berhubungan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab, antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Oleh sebab itu diperlukan susunan organisasi yang jelas. Menurut UU No. 25 tahun 1992, perangkat organisasi koperasi terdiri dari; Rapat Anggota (RA), pengurus, dan pengawas.

a. Rapat Anggota (RA)

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Rapat anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

b. Bidang Organisasi Koperasi yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa (RALB).

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan. Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus.

Setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut,
- b. keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Jumlah susunan pengurus, pengawas, dan anggota koperasi yang terdaftar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Pengurus, Pengawas, Anggota, dan Bidang Usaha Koperasi yang Terdaftar Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU

No.	Nama Koperasi	Jumlah Pengurus		Jumlah Pengawas		Jumlah Anggota		Jmlh Bidang Usaha
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	
1	BAPPEDA	3	3	3	3	92	113	1
2	BIDUK KENCANA	3	5	3	5	90	89	3
3	BINA MANDIRI	5	3	5	3	593	625	1
4	BINA SEJAHTERA	5	5	3	3	265	297	1
5	BONITA	4	4	5	5	41	52	1
6	EMPAT SERASAN	3	3	3	3	99	116	3
7	KARYA AGUNG	6	3	6	3	107	110	1
8	KARYA HUSADA	5	5	3	3	514	590	1
9	KARYA SEJAHTERA	3	3	2	2	56	83	2
10	MELATI	3	3	2	2	50	56	2
11	PRIMKOJAK	5	5	3	3	30	38	1
12	SEHATI	3	3	3	3	99	103	1
13	SUMBER GIZI	3	3	3	3	55	77	3
14	TUNAS BARU	6	8	3	3	135	150	4
15	WAHANA NIAGA	3	3	3	3	44	43	1

Bidang usaha yang dikelola oleh koperasi yang terdaftar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU antara lain:

1. Bappeda, bidang usaha simpan pinjam.
2. Biduk Kencana, bidang usaha; simpan pinjam, waserda, piutang barang dan jasa.
3. Bina Mandiri, bidang usaha; simpan pinjam.
4. Bina Sejahtera, bidang usaha; simpan pinjam.

5. Bonita, bidang usaha; simpan pinjam.
6. Empat Serasan, bidang usaha; simpan pinjam, pertokoan, dan pengelolaan aset BLK.
7. Karya Agung, bidang usaha; simpan pinjam.
8. Karya Husada, bidang usaha; simpan pinjam.
9. Karya Sejahtera, bidang usaha; simpan pinjam, dan pertokoan.
10. Melati, bidang usaha; simpan pinjam dan pertokoan.
11. Primkojak, bidang usaha; simpan pinjam.
12. Sehati, bidang usaha; simpan pinjam.
13. Sumber Gizi, bidang usaha; simpan pinjam, waserda, dan pemeliharaan ayam potong.
14. Tunas Baru, bidang usaha; simpan pinjam, waserda, asuransi, dan pertokoan.
15. Wahana Niaga, bidang usaha; simpan pinjam.

Analisis Data

Deskriptif Persentase (DP)

Analisis deskriptif persentase digunakan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU. Berikut ini disajikan hasil perhitungan skor deskriptif persentase kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi tahun 2008:

Tabel 4.2 Skor Deskriptif Persentase Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi yang Terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU Tahun 2008

NO	NAMA KOPERASI	Skor						
		Neraca	PHU	LPEA	LAK	CALK	Total	Persentase
1	BAPPEDA	4	3	0	0	3	10	16.39
2	BIDUK KENCANA	10	3	0	0	4	17	27.87
3	BINA MANDIRI	9	4	0	0	5	18	29.51
4	BINA SEJAHTERA	12	3	0	0	4	19	31.15
5	BONITA	12	3	0	0	2	17	27.87
6	EMPAT SERASAN	10	7	0	0	2	19	31.15
7	KARYA AGUNG	5	4	0	0	4	13	21.31
8	KARYA HUSADA	9	4	0	0	5	18	29.51
9	KARYA SEJAHTERA	14	6	0	0	4	24	39.34
10	MELATI	10	2	0	0	1	13	21.31
11	PRIMKOJAK	10	3	0	0	1	14	22.95

12	SEHATI	12	3	0	0	3	18	29.51
13	SUMBER GIZI	15	4	0	0	5	24	39.34
14	TUNAS BARU	15	6	0	0	4	25	40.98
15	WAHANA NIAGA	14	6	0	0	4	24	39.34
	TOTAL	161	61	0	0	51	273	447.54
	Rata-Rata	10.73	4.07	0	0	3.40	18.20	29.84

Rata-rata skor tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU tahun 2008 sebesar 29.84% yang diperoleh dari hasil pembagian antara jumlah rata-rata skor yang diungkapkan sebesar 18.20 dengan jumlah skor ideal sebesar 61. Di bawah ini merupakan penjelasan dari rata-rata komponen laporan keuangan yang diungkapkan:

- a. Ditinjau dari pengungkapan neraca, skor yang seharusnya diungkapkan adalah 28, sedangkan rata-rata skor yang diungkapkan sebanyak 10.73 yang diperoleh dari hasil bagi antara jumlah skor neraca yang diungkapkan sebesar 161 dengan jumlah koperasi 15. Koperasi yang hanya mengelola bidang usaha simpan pinjam berjumlah 9 koperasi yaitu koperasi Bappeda mengungkapkan 4 item, Bina Mandiri mengungkapkan 9 item, Bina Sejahtera mengungkapkan 12 item, Bonita mengungkapkan 12 item, Karya Agung mengungkapkan 5 item, Karya Husada mengungkapkan 9 item, Primkojak mengungkapkan 10 item, Sehati mengungkapkan 12 item, Wahana Niaga mengungkapkan 14 item, pengungkapan neraca tertinggi untuk koperasi usaha simpan pinjam sebesar 14 item yaitu koperasi Wahana Niaga, pengungkapan terendah sebesar 4 item yaitu koperasi Bappeda.

Koperasi yang mengelola bidang usaha simpan pinjam dan waserda/pertokoan berjumlah 6 koperasi yaitu koperasi Biduk Kencana mengungkapkan 10 item, Empat Serasan mengungkapkan 10 item, Karya Sejahtera mengungkapkan 14 item, Melati mengungkapkan 10 item, Sumber Gizi mengungkapkan 15 item, Tunas Baru mengungkapkan 15 item, pengungkapan neraca tertinggi untuk koperasi usaha simpan pinjam dan waserda/pertokoan sebesar 15 item yaitu koperasi Sumber Gizi dan Tunas Baru, pengungkapan terendah sebesar 10 item yaitu koperasi Biduk Kencana, Empat Serasan, dan Melati.

Berdasarkan dari tabel tersebut dapat dilihat rata-rata item yang diungkapkan dari 15 koperasi yang diteliti oleh peneliti ada 9 item yaitu (1.1) Kas dan Bank diungkapkan oleh 14 koperasi; (1.4) Piutang Anggota diungkapkan oleh 9 koperasi; (1.5) Piutang Non Anggota diungkapkan oleh 8 koperasi; (5.4) Simpanan Sukarela diungkapkan oleh

12 koperasi; (5.5) Dana-dana SHU diungkapkan oleh 9 koperasi; (7.1) Simpanan pokok diungkapkan oleh 15 koperasi; (7.2) Simpanan Wajib diungkapkan oleh 15 koperasi; (7.6) Cadangan diungkapkan oleh 12 koperasi; (7.7) SHU tahun berjalan diungkapkan oleh 12 koperasi.

Hasil dari analisis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi pada neraca untuk tahun 2008 masih jauh dari standar yang ditetapkan pada PSAK No 27 tahun 2009.

- b. Ditinjau dari pengungkapan perhitungan hasil usaha, skor yang seharusnya diungkapkan adalah 13, sedangkan rata-rata skor yang diungkapkan sebanyak 4.07 yang diperoleh dari hasil bagi antara jumlah skor perhitungan hasil usaha yang diungkapkan sebesar 61 dengan jumlah koperasi 15. Koperasi yang hanya mengelola bidang usaha simpan pinjam berjumlah 9 koperasi yaitu koperasi Bappeda mengungkapkan 3 item, Bina Mandiri mengungkapkan 4 item, Bina Sejahtera mengungkapkan 3 item, Bonita mengungkapkan 3 item, Karya Agung mengungkapkan 4 item, Karya Husada mengungkapkan 4 item, Primkojak mengungkapkan 3 item, Sehati mengungkapkan 3 item, Wahana Niaga mengungkapkan 6 item, pengungkapan perhitungan hasil usaha tertinggi untuk koperasi usaha simpan pinjam sebesar 6 item yaitu koperasi Wahana Niaga, pengungkapan terendah sebesar 3 item yaitu koperasi Bappeda, Bina Sejahtera, Bonita, Primkojak dan Sehati.

Koperasi yang mengelola bidang usaha simpan pinjam dan waserda/pertokoan berjumlah 6 koperasi yaitu koperasi Biduk Kencana mengungkapkan 3 item, Empat Serasan mengungkapkan 7 item, Karya Sejahtera mengungkapkan 6 item, Melati mengungkapkan 2 item, Sumber Gizi mengungkapkan 4 item, Tunas Baru mengungkapkan 6 item, pengungkapan perhitungan hasil usaha tertinggi untuk koperasi usaha simpan pinjam dan waserda/pertokoan sebesar 7 item yaitu koperasi Empat Serasan, pengungkapan terendah sebesar 2 item yaitu Melati .

Berdasarkan dari tabel tersebut dapat dilihat rata-rata item yang diungkapkan dari 15 koperasi yang diteliti oleh peneliti ada 4 item yaitu (1.3) Pendapatan Netto Anggota diungkapkan oleh 14 koperasi; (3.1) Beban Usaha diungkapkan oleh 14 koperasi; (3.2) Beban Perkoperasian diungkapkan oleh 8 koperasi; (3.3) SHU Koperasi diungkapkan oleh 12 koperasi.

Hasil dari analisis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi pada perhitungan hasil usaha untuk tahun 2008 masih jauh dari standar yang ditetapkan pada PSAK No 27 tahun 2009.

c. Ditinjau dari pengungkapan laporan promosi ekonomi anggota, rata-rata skor yang diungkapkan sebanyak 0, sedangkan skor yang seharusnya diungkapkan adalah 4 item dengan akun sebagai berikut Manfaat ekonomi dari pembelian/pengadaan jasa bersama, Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama, Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi, Manfaat ekonomi dalam bentuk SHU.

Hasil dari analisis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi pada laporan promosi ekonomi anggota untuk tahun 2008 masih jauh dari standar yang ditetapkan pada PSAK No 27 tahun 2009.

d. Ditinjau dari pengungkapan laporan arus kas, rata-rata skor yang diungkapkan adalah 0, sedangkan skor yang seharusnya diungkapkan adalah 3 item dengan akun sebagai berikut Arus Kas Dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Dari Aktivitas Investasi, Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan.

Hasil dari analisis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi pada laporan arus kas untuk tahun 2008 masih jauh dari standar yang ditetapkan pada PSAK No 27 tahun 2009.

e. Ditinjau dari pengungkapan catatan atas laporan keuangan, skor yang seharusnya diungkapkan adalah 13, sedangkan rata-rata skor yang diungkapkan sebanyak 3.40 yang diperoleh dari hasil bagi antara jumlah skor catatan atas laporan keuangan yang diungkapkan sebesar 51 dengan jumlah koperasi 15. Koperasi yang hanya mengelola bidang usaha simpan pinjam berjumlah 9 koperasi yaitu koperasi Bappeda mengungkapkan 3 item, Bina Mandiri mengungkapkan 5 item, Bina Sejahtera mengungkapkan 4 item, Bonita mengungkapkan 2 item, Karya Agung mengungkapkan 4 item, Karya Husada mengungkapkan 5 item, Primkojak mengungkapkan 1 item, Sehati mengungkapkan 3 item, Wahana Niaga mengungkapkan 4 item, pengungkapan catatan atas laporan keuangan tertinggi untuk koperasi usaha simpan pinjam sebesar 5 item yaitu koperasi Bina Mandiri dan Karya Husada, pengungkapan terendah sebesar 1 item yaitu koperasi Primkojak.

Koperasi yang mengelola bidang usaha simpan pinjam dan waserda/pertokoan berjumlah 6 koperasi yaitu koperasi Biduk Kencana mengungkapkan 4 item, Empat Serasan mengungkapkan 2 item, Karya Sejahtera mengungkapkan 4 item, Melati mengungkapkan 1 item, Sumber Gizi mengungkapkan 5 item, Tunas Baru

mengungkapkan 4 item, pengungkapan catatan atas laporan keuangan tertinggi untuk koperasi usaha simpan pinjam dan waserda/pertokoan sebesar 5 item yaitu koperasi Sumber Gizi, pengungkapan terendah sebesar 1 item yaitu Melati.

Berdasarkan dari tabel tersebut dapat dilihat rata-rata item yang diungkapkan dari 15 koperasi yang diteliti oleh peneliti ada 4 item yaitu (2.1) Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam AD / ART maupun dalam praktik, atau yang telah dicapai oleh koperasi diungkapkan oleh 11 koperasi.; (2.2) Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota diungkapkan oleh 11 koperasi;. (2.8) Pembagian Sisa Hasil Usaha dan penggunaan cadangan diungkapkan oleh 11 koperasi.; (2.10) Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan diungkapkan oleh 10 koperasi.

Hasil dari analisis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi pada catatan atas laporan keuangan untuk tahun 2008 masih jauh dari standar yang ditetapkan pada PSAK No 27 tahun 2009.

Berdasarkan pengungkapan komponen laporan keuangan untuk tahun 2008 , dapat diketahui bahwa komponen yang hanya diungkapkan hanyalah Neraca, Perhitungan Hasil Usaha dan Catatan atas Laporan Keuangan baik koperasi simpan pinjam saja maupun koperasi simpan pinjam dan waserda/pertokoan, rata-rata jumlah skor yang diungkapkan hanya 18.20, sedangkan jumlah skor yang seharusnya diungkapkan adalah 61, masih jauh dari standar yang ditetapkan pada PSAK No 27 tahun 2009.

Koperasi yang memiliki tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan di atas rata-rata sebanyak 6 koperasi dengan rincian Bina Sejahtera, Empat Serasan, Karya Sejahtera, Sumber Gizi, Tunas Baru, dan Wahana Niaga, sedangkan untuk koperasi yang memiliki tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan di bawah rata-rata sebanyak 9 koperasi, dengan rincian Bappeda, Biduk Kencana, Bina Mandiri, Bonita, Karya Agung, Karya Husada, Melati, Primkojak, Dan Sehati.

Rata-rata kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU pada tahun 2008 sebesar 29.84%, kelengkapan pengungkapan wajib yang tertinggi dicapai oleh

koperasi Tunas Baru yaitu sebesar 40.98%, sedangkan yang terendah pada koperasi Bappeda yaitu sebesar 16.39%.

Berikut tabel ringkasan kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU Tahun 2008

Tabel 4.3. Ringkasan Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU Tahun 2008

No	Komponen	Item Pengungkapan				Tingkat Kelengkapan
		Sesuai Dgn Psak	Tertinggi	Rata-Rata	Terendah	
1	NERACA	28	15	10,73	4	Masih jauh dari standar PSAK No 27
2	PHU	13	7	4,07	2	Masih jauh dari standar PSAK No 27
3	LPEA	4	0	0	0	Masih jauh dari standar PSAK No 27
4	LAK	3	0	0	0	Masih jauh dari standar PSAK No 27
5	CALK	13	5	3,40	1	Masih jauh dari standar PSAK No 27
TOTAL		61	27	18,20	7	

Pada tahun 2009, hasil perhitungan skor deskriptif persentase kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi adalah:

Tabel 4.4. Skor Deskriptif Persentase Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi yang terdaftar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU Tahun 2009

NO	NAMA KOPERASI	Skor						Total	Persentase
		Neraca	PHU	LPEA	LAK	CALK			
1	BAPPEDA	5	4	0	0	3	12	19.67	
2	BIDUK KENCANA	15	4	0	0	5	24	39.34	
3	BINA MANDIRI	13	4	0	0	6	23	37.70	
4	BINA SEJAHTERA	15	4	0	0	6	25	40.98	
5	BONITA	15	4	0	0	3	22	36.07	
6	EMPAT SERASAN	11	7	0	0	3	21	34.43	
7	KARYA AGUNG	8	4	0	0	5	17	27.87	
8	KARYA HUSADA	10	4	0	0	6	20	32.79	

9	KARYA SEJAHTERA	14	6	0	0	5	25	40.98
10	MELATI	12	3	0	0	1	16	26.23
11	PRIMKOJAK	13	4	0	0	1	18	29.51
12	SEHATI	14	4	0	0	4	22	36.07
13	SUMBER GIZI	17	6	0	0	6	29	47.54
14	TUNAS BARU	15	6	0	0	4	25	40.98
15	WAHANA NIAGA	14	6	0	0	4	24	39.34
	TOTAL	191	70	0	0	62	323	529.51
	Rata-Rata	12.73	4.67	0	0	4.13	21.53	35.30

Rata-rata skor tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU tahun 2009 sebesar 35.30% yang diperoleh dari hasil pembagian antara jumlah rata-rata skor yang diungkapkan sebesar 21.53 dengan jumlah skor ideal sebesar 61. Di bawah ini merupakan penjelasan dari rata-rata komponen laporan keuangan yang diungkapkan:

- a. Ditinjau dari penyajian neraca, skor ideal untuk neraca adalah 28, sedangkan rata-rata skor yang diungkapkan sebanyak 12.73 yang diperoleh dari hasil bagi antara jumlah skor neraca yang diungkapkan sebesar 191 dengan jumlah koperasi 15.

Koperasi yang hanya mengelola bidang usaha simpan pinjam berjumlah 9 koperasi yaitu koperasi Bappeda mengungkapkan 5 item, Bina Mandiri mengungkapkan 13 item, Bina Sejahtera mengungkapkan 15 item, Bonita mengungkapkan 15 item, Karya Agung mengungkapkan 8 item, Karya Husada mengungkapkan 10 item, Primkojak mengungkapkan 13 item, Sehati mengungkapkan 14 item, Wahana Niaga mengungkapkan 14 item, pengungkapan neraca tertinggi untuk koperasi usaha simpan pinjam sebesar 15 item yaitu koperasi Bina Sejahtera dan Bonita, pengungkapan terendah sebesar 5 item yaitu koperasi Bappeda.

Koperasi yang mengelola bidang usaha simpan pinjam dan waserda/pertokoan berjumlah 6 koperasi yaitu koperasi Biduk Kencana mengungkapkan 15 item, Empat Serasan mengungkapkan 11 item, Karya Sejahtera mengungkapkan 14 item, Melati mengungkapkan 12 item, Sumber Gizi mengungkapkan 17 item, Tunas Baru mengungkapkan 15 item, pengungkapan neraca tertinggi untuk koperasi usaha simpan pinjam dan waserda/pertokoan sebesar 17 item yaitu koperasi Sumber Gizi, pengungkapan terendah sebesar 11 item yaitu koperasi Empat Serasan.

Berdasarkan dari tabel tersebut dapat dilihat rata-rata item yang diungkapkan dari 15 koperasi yang diteliti oleh peneliti ada 11 item yaitu (1.1) Kas dan Bank

diungkapkan oleh 14 koperasi; (1.4) Piutang Anggota diungkapkan oleh 10 koperasi; (1.5) Piutang Non Anggota diungkapkan oleh 9 koperasi; (1.7) Piutang Lain-lain diungkapkan oleh 8 koperasi; (1.8) Persediaan diungkapkan oleh 7 koperasi; (5.4) Simpanan Sukarela diungkapkan oleh 13 koperasi; (5.5) Dana-dana SHU diungkapkan oleh 10 koperasi; (7.1) Simpanan pokok diungkapkan oleh 15 koperasi; (7.2) Simpanan Wajib diungkapkan oleh 15 koperasi; (7.6) Cadangan diungkapkan oleh 14 koperasi; (7.7) SHU tahun berjalan diungkapkan oleh 14 koperasi.

Hasil dari analisis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi pada neraca untuk tahun 2009 masih jauh dari standar yang ditetapkan pada PSAK No 27 tahun 2009.

- b. Ditinjau dari penyajian perhitungan hasil usaha, skor ideal untuk perhitungan hasil usaha adalah 13, sedangkan rata-rata skor yang diungkapkan sebanyak 4.67 yang diperoleh dari hasil bagi antara jumlah skor perhitungan hasil usaha yang diungkapkan sebesar 70 dengan jumlah koperasi 15.

Koperasi yang hanya mengelola bidang usaha simpan pinjam berjumlah 9 koperasi yaitu koperasi Bappeda mengungkapkan 4 item, Bina Mandiri mengungkapkan 4 item, Bina Sejahtera mengungkapkan 4 item, Bonita mengungkapkan 4 item, Karya Agung mengungkapkan 4 item, Karya Husada mengungkapkan 4 item, Primkojak mengungkapkan 4 item, Sehati mengungkapkan 4 item, Wahana Niaga mengungkapkan 6 item, pengungkapan perhitungan hasil usaha tertinggi untuk koperasi usaha simpan pinjam sebesar 6 item yaitu koperasi Wahana Niaga, pengungkapan terendah sebesar 4 item yaitu koperasi Bappeda, Bina Mandiri, Bina Sejahtera, Bonita, Karya Agung, Karya Husada Primkojak dan Sehati.

Koperasi yang mengelola bidang usaha simpan pinjam dan waserda/pertokoan berjumlah 6 koperasi yaitu koperasi Biduk Kencana mengungkapkan 4 item, Empat Serasan mengungkapkan 7 item, Karya Sejahtera mengungkapkan 6 item, Melati mengungkapkan 3 item, Sumber Gizi mengungkapkan 6 item, Tunas Baru mengungkapkan 6 item, pengungkapan perhitungan hasil usaha tertinggi untuk koperasi usaha simpan pinjam dan waserda/pertokoan sebesar 7 item yaitu koperasi Empat Serasan, pengungkapan terendah sebesar 3 item yaitu Melati (Lihat Lampiran 5 pada PHU).

Berdasarkan dari tabel tersebut dapat dilihat rata-rata item yang diungkapkan dari 15 koperasi yang diteliti oleh peneliti ada 5 item yaitu (1.1) Partisipasi anggota diungkapkan oleh 4 koperasi; (1.3) Pendapatan Netto Anggota diungkapkan oleh 14 koperasi; (3.1) Beban Usaha diungkapkan oleh 14 koperasi; (3.2) Beban Perkoperasian diungkapkan oleh 14 koperasi; (3.3) SHU Koperasi diungkapkan oleh 13 koperasi.

Hasil dari analisis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi pada perhitungan hasil usaha untuk tahun 2009 masih jauh dari standar yang ditetapkan pada PSAK No 27 tahun 2009.

- c. Ditinjau dari penyajian laporan promosi ekonomi anggota, rata-rata skor yang diungkapkan sebanyak 0, sedangkan skor ideal untuk laporan promosi ekonomi anggota adalah 4. dengan akun sebagai berikut Manfaat ekonomi dari pembelian/pengadaan jasa bersama, Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama, Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi, Manfaat ekonomi dalam bentuk SHU.

Hasil dari analisis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi pada laporan promosi ekonomi anggota untuk tahun 2009 masih jauh dari standar yang ditetapkan pada PSAK No 27 tahun 2009.

- d. Ditinjau dari penyajian laporan arus kas, skor ideal untuk laporan arus kas adalah 3, sedangkan rata-rata skor yang diungkapkan sebanyak 0. dengan akun sebagai berikut Arus Kas Dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Dari Aktivitas Investasi, Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan.

Hasil dari analisis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi pada laporan arus kas untuk tahun 2009 masih jauh dari standar yang ditetapkan pada PSAK No 27 tahun 2009.

- e. Ditinjau dari penyajian catatan atas laporan keuangan, skor ideal untuk catatan atas laporan keuangan adalah 13, sedangkan rata-rata skor yang diungkapkan sebanyak 4.13 yang diperoleh dari hasil bagi antara jumlah skor catatan atas laporan keuangan yang diungkapkan sebesar 62 dengan jumlah koperasi 15.

Koperasi yang hanya mengelola bidang usaha simpan pinjam berjumlah 9 koperasi yaitu koperasi Bappeda mengungkapkan 3 item, Bina Mandiri mengungkapkan 6 item, Bina Sejahtera mengungkapkan 6 item, Bonita mengungkapkan 3 item, Karya Agung mengungkapkan 5 item, Karya Husada mengungkapkan 6 item, Primkojak mengungkapkan 1 item, Sehati mengungkapkan 4 item, Wahana Niaga mengungkapkan 4 item, pengungkapan catatan atas laporan keuangan tertinggi untuk koperasi usaha simpan pinjam sebesar 6 item yaitu koperasi Bina Mandiri, Bina Sejahtera, dan Karya Husada, pengungkapan terendah sebesar 1 item yaitu koperasi Primkojak.

Koperasi yang mengelola bidang usaha simpan pinjam dan waserda/pertokoan berjumlah 6 koperasi yaitu koperasi Biduk Kencana mengungkapkan 5 item, Empat Serasan mengungkapkan 3 item, Karya Sejahtera mengungkapkan 5 item, Melati mengungkapkan 1 item, Sumber Gizi mengungkapkan 6 item, Tunas Baru mengungkapkan 4 item, pengungkapan catatan atas laporan keuangan tertinggi untuk koperasi usaha simpan pinjam dan waserda/pertokoan sebesar 6 item yaitu koperasi Sumber Gizi, pengungkapan terendah sebesar 1 item yaitu Melati.

Berdasarkan dari tabel tersebut dapat dilihat rata-rata item yang diungkapkan dari 15 koperasi yang diteliti oleh peneliti ada 5 item yaitu (2.1) Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam AD / ART maupun dalam praktik, atau yang telah dicapai oleh koperasi diungkapkan oleh 11 koperasi.; (2.2) Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota diungkapkan oleh 11 koperasi; (2.3) Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota diungkapkan oleh 10 koperasi (2.8) Pembagian Sisa Hasil Usaha dan penggunaan cadangan diungkapkan oleh 12 koperasi.; (2.10) Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan diungkapkan oleh 13 koperasi.

Hasil dari analisis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi pada catatan atas laporan

keuangan untuk tahun 2009 masih jauh dari standar yang ditetapkan pada PSAK No 27 tahun 2009.

Berdasarkan penyajian komponen laporan keuangan untuk tahun 2009 dapat diketahui bahwa komponen yang hanya diungkapkan hanyalah Neraca, Perhitungan Hasil Usaha dan Catatan atas Laporan Keuangan baik koperasi simpan pinjam saja maupun koperasi simpan pinjam dan waserda/pertokoan, rata-rata jumlah skor yang diungkapkan hanya 21.53, sedangkan jumlah skor yang seharusnya diungkapkan adalah 61 item, masih jauh dari standar yang ditetapkan pada PSAK No 27 tahun 2009.

Koperasi yang memiliki tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan di atas rata-rata sebanyak 9 koperasi dengan rincian Biduk Kencana, Bina Mandiri, Bina Sejahtera, Bonita, Karya Sejahtera, Sehati, Sumber Gizi, Tunas Baru, Dan Wahana Niaga, sedangkan untuk koperasi yang memiliki tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan di bawah rata-rata sebanyak 6 koperasi, dengan rincian Bappeda, Empat Serasan, Karya Agung, Karya Husada, Melati, Dan Primkojak.

Rata-rata kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU pada tahun 2009 sebesar 35.30%, kelengkapan pengungkapan wajib yang tertinggi dicapai oleh koperasi Sumber Gizi yaitu sebesar 47.54%, sedangkan yang terendah pada koperasi Bappeda yaitu sebesar 19.67%.

Berikut tabel ringkasan kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU Tahun 2009

Tabel 4.5. Ringkasan Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU Tahun 2009

No	Komponen	Item Pengungkapan				Tingkat Kelengkapan
		Sesuai Dgn Psak	Tertinggi	Rata-Rata	Terendah	
1	NERACA	28	17	12,73	5	Masih jauh dari standar PSAK No 27
2	PHU	13	7	4,67	3	Masih jauh dari standar PSAK No 27
3	LPEA	4	0	0	0	Masih jauh dari standar PSAK No 27
4	LAK	3	0	0	0	Masih jauh dari standar PSAK No 27
5	CALK	13	6	4,13	1	Masih jauh dari standar PSAK No 27
TOTAL		61	30	21,53	9	

Berikut ini disajikan tabel rata-rata perbedaan pengungkapan komponen laporan keuangan tahun 2008 dan 2009.

Tabel 4.6. Rata-Rata Perbedaan Pengungkapan Komponen Laporan Keuangan Tahun 2008 dan 2009

No.	Komponen	Tahun		Perbedaan Naik (Turun)
		2008	2009	
1	Neraca	10.73	12.73	2.00
2	Perhitungan Hasil Usaha	4.07	4.67	0.60
3	Laporan Promosi Ekonomi Anggota	0	0	0.00
4	Laporan Arus Kas	0	0	0.00
5	Catatan Atas Laporan Keuangan	3.40	4.13	0.73
	Total	18.20	21.53	3.33

Berdasarkan tabel rata-rata perbedaan pengungkapan komponen laporan keuangan tahun 2008 dan 2009 tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan sebagai berikut:

a. Neraca

Pada tahun 2008 rata-rata pengungkapan item neraca sebesar 10.73 item, sedangkan pada tahun 2009 sebesar 12.73 item yang berarti rata-rata pengungkapan item neraca tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 2 item.

b. Perhitungan Hasil Usaha

Pada tahun 2008 rata-rata pengungkapan item perhitungan hasil usaha sebesar 4.07 item, sedangkan pada tahun 2009 sebesar 4.67 item yang berarti rata-rata pengungkapan item perhitungan hasil usaha tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 0,6 item.

c. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Pada tahun 2008 rata-rata pengungkapan item laporan promosi ekonomi anggota sebesar 0 item, sedangkan pada tahun 2009 sebesar 0 item yang berarti tidak ada perubahan pengungkapan.

d. Laporan Arus Kas

Pada tahun 2008 rata-rata pengungkapan item laporan arus kas sebesar 0 item, sedangkan pada tahun 2009 sebesar 0 item yang berarti tidak ada perubahan pengungkapan.

e. Catatan atas laporan keuangan

Pada tahun 2008 rata-rata pengungkapan item catatan atas laporan keuangan sebesar 3.40 item, sedangkan pada tahun 2009 sebesar 4.13 item yang berarti rata-rata pengungkapan item catatan atas laporan keuangan tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 0,73 item.

Rendahnya rata-rata skor kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi tahun 2008 yang hanya sebesar 29.84%, dan tahun 2009 sebesar 35.30% dan berbedanya tingkat pengungkapan item baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi simpan pinjam dan waserda/pertokoan, pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pengungkapan komponen dan item laporan keuangan yang tidak berpedoman pada PSAK No 27, tetapi hanya berdasarkan pada aktivitas yang dilakukan selama periode tersebut dilihat dari item mana yang menurut pengurus berguna dan tidak membingungkan anggota dalam membaca, memahami dalam rangka untuk mengambil keputusan.
2. pengungkapan item-item komponen laporan keuangan yang tidak sepenuhnya diungkapkan oleh koperasi dikarenakan kurangnya informasi dan pengetahuan serta pemahaman para pengurus dalam mengungkapkan item-item tersebut di Laporan Keuangan RAT oleh sebab itu item yang diungkapkan hanya berdasarkan pada aktivitas yang dilaksanakan.
3. Koperasi yang secara finansialnya (aktiva) kuat akan lebih banyak mengungkapkan informasi dari pada koperasi yang secara finansialnya (aktiva) lemah.
4. Koperasi yang memiliki tingkat kesehatan sangat baik akan lebih banyak mengungkapkan informasi dibandingkan dengan koperasi yang kurang sehat.
5. Koperasi yang memiliki tingkat kelengkapan tinggi cenderung koperasi yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP memberikan standar yang lengkap sesuai dengan PSAK, sehingga koperasi yang diaudit oleh KAP memiliki tingkat kelengkapan tinggi. Sedangkan koperasi yang memiliki tingkat kelengkapan rendah tidak diaudit oleh KAP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rata-rata tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU tahun 2008 yang hanya sebesar 29.84% dan tahun 2009 sebesar 35.30%.

Tahun 2008 untuk koperasi simpan pinjam pengungkapan item yang tertinggi 39,34% yaitu pada koperasi Wahana Niaga dan yang terendah 16,39% yaitu koperasi Bappeda, Koperasi bidang usaha simpan pinjam dan waserda/pertokoan, pengungkapan item yang tertinggi 40,98% yaitu pada koperasi Tunas Baru dan yang terendah 21,31% yaitu koperasi Melati.

Tahun 2009 untuk koperasi simpan pinjam pengungkapan item yang tertinggi 40,98% yaitu pada koperasi Bina Sejahtera dan yang terendah 19,67% yaitu koperasi Bappeda, Koperasi bidang usaha simpan pinjam dan waserda/pertokoan, pengungkapan item yang tertinggi 47,54% yaitu pada koperasi Sumber Gizi dan yang terendah 26,23% yaitu koperasi Melati.

2. Penyebab perbedaan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan Koperasi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten OKU tahun 2008 dengan 2009, disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Pengungkapan komponen dan item laporan keuangan yang tidak berpedoman pada PSAK No 27, tetapi hanya berdasarkan pada aktivitas yang dilakukan selama periode tersebut dilihat dari item mana yang menurut pengurus berguna dan tidak membingungkan anggota dalam membaca, memahami dalam rangka untuk mengambil keputusan.
 - b. pengungkapan item-item komponen laporan keuangan yang tidak sepenuhnya diungkapkan oleh koperasi dikarenakan kurangnya informasi dan pengetahuan serta pemahaman para pengurus dalam mengungkapkan item-item tersebut di Laporan Keuangan RAT oleh sebab itu item yang diungkapkan hanya berdasarkan pada aktivitas yang dilaksanakan.

- c. Koperasi yang secara financialnya (aktiva) kuat akan lebih banyak mengungkapkan informasi dari pada koperasi yang secara financialnya (aktiva) lemah.
- d. Koperasi yang memiliki tingkat kesehatan sangat baik akan lebih banyak mengungkapkan informasi dibandingkan dengan koperasi yang kurang sehat.
- e. Koperasi yang memiliki tingkat kelengkapan tinggi cenderung koperasi yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP memberikan standar yang lengkap sesuai dengan PSAK, sehingga koperasi yang diaudit oleh KAP memiliki tingkat kelengkapan tinggi. Sedangkan koperasi yang memiliki tingkat kelengkapan rendah tidak diaudit oleh KAP.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya, lebih difokuskan pada sumber daya manusia (pengurus koperasi) untuk meningkatkan pengetahuan pengurus koperasi tentang kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan yang diatur dalam PSAK No. 27 tahun 2009, maka perlu diadakan seminar maupun pelatihan penyusunan laporan keuangan secara lengkap, memberikan keterampilan dalam bidang manajemen keuangan, manajemen perkoperasian, serta mengadakan hubungan kerjasama yang baik dengan pihak KAP dalam peningkatan kualitas kelengkapan laporan keuangan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Almilia,L.S dan Ikka.R. 2007. *Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengungkapan dalam Laporan tahunan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ*. Proceeding Seminar Nasional. FE Universitas Trisakti Jakarta.
- Belkaouli,A.R. 2000. *Teori Akuntansi*. Buku I. Media Soft Indonesia. Jakarta
- Binsar,H.S dan Lusy.W. 2004. *Faktor - faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol 7, No.3, September 2004 Hal 351-366.
- Chariri,A dan Ghozali,I. 2003. *Teori Akuntansi*. BP UNDIP. Semarang

- Fitriani.2001.*Signifikansi Perbedaan Tingkat Kelengkapan Wajib dan Sukarela pada Laporan Keuangan Perusahaan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*. Makalah Dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi IV.
- Harahap,S.S.2001.*Teori Akuntansi*.PT.RajaGrafindo Persada.Jakarta
- Harahap,S.S.2002.*Teori Akuntansi Laporan Keuangan*.Bumi Aksara.Jakarta
- IAI. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta
- Margono, S. 2002. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta. Jakarta
- Marwata. 2001. *Hubungan Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Ungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia*. Makalah dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi IV.
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. BPFE UII. Yogyakarta
- Mintara,Y.H. 2008. *Pengaruh Implementasi Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Informasi*.Skripsi Universitas Islam Indonesia (Tidak dipublikasikan).
- Na'im,A. dan Fuad.R. 2000. *Analisis Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 15. No. 1. pp 70-82
- Nugraheni, B. Linggar.Y.,Oct.Digdo.H, dan Lucia.H.P. 2002. *Analisis Faktor-Faktor Fundamental Perusahaan terhadap Kelengkapan Laporan Keuangan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. VIII. No.1.pp.75-91
- Permana,L.2007. *Studi Komparatif Tentang Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi Yang Terdaftar Di Dinkop Dan Ukm Kabupaten Semarang Antara Tahun 2004 Dengan 2005*.Skripsi (Tidak dipublikasikan).
- Sugiono.2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Jakarta

Supranto, J. 2003. *Metode Riset*. PT. Rineka Cipta. Jakarta

Subiyantoro, E. 1996. *Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Karakteristik Perusahaan Publik di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi I. Yogyakarta 105

Sitio, A. dan Tamba, H. 2001. *Koperasi Teori dan Praktek*. Erlangga. Jakarta

[www.depkop.go.id/Keputusan Menteri Negara_Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor129.2002 Tentang Perkoperasian](http://www.depkop.go.id/Keputusan_Menteri_Negara_Koperasi_Dan_Usaha_Kecil_Menengah_Nomor129.2002_Tentang_Perkoperasian)

[www.depkop.go.id/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian](http://www.depkop.go.id/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_25_Tahun_1992_Tentang_Perkoperasian)

Lampiran

**Daftar Item Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi
Berdasarkan PSAK No. 27 Tahun 2009 Tentang Perkoperasian**

A. Neraca (28 item)

1. Aktiva Lancar
 - 1.1. Kas dan Bank
 - 1.2. Simpanan Jangka Pendek
 - 1.3. Piutang Usaha
 - 1.4. Piutang Anggota
 - 1.5. Piutang Non-Anggota
 - 1.6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih
 - 1.7. Piutang Lain-Lain
 - 1.8. Persediaan
 - 1.9. Biaya Dibayar Dimuka

2. Investasi Jangka Panjang
 - 2.1. Penyertaan Pada Koperasi
 - 2.2. Penyertaan Pada Non-Koperasi

3. Aktiva Tetap

4. Aktiva Lain-Lain

5. Kewajiban Lancar
 - 5.1. Hutang Usaha
 - 5.2. Hutang Non Anggota
 - 5.3. Hutang Bank
 - 5.4. Simpanan Sukarela
 - 5.5. Dana-Dana SHU

5.6. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

6. Kewajiban Jangka Panjang

6.1. Hutang Bank

6.2. Hutang Jangka Panjang lainnya

7. Ekuitas

7.1. Simpanan Pokok

7.2. Simpanan Wajib

7.3. Simpanan Lain

7.4. Modal Penyertaan

7.5. Modal Sumbangan

7.6. Cadangan

7.7. SHU Tahun Berjalan

B. Perhitungan Hasil Usaha (13 item)

1. Partisipasi Anggota

1.1. Partisipasi Anggota

1.2. Beban Pokok

1.3. Pendapatan Netto Anggota

2. Pendapatan Dari Non Anggota

2.1. Penjualan

2.2. HPP

2.3. Laba / Rugi Kotor Dengan Non Anggota

3. Beban Operasi

3.1. Beban Usaha

3.2. Beban Perkoperasian

3.3. SHU Koperasi

3.4. Pendapatan Dan Beban Lain-Lain

3.5. SHU Sebelum Pajak

3.6. PPh

3.7. SHU Setelah Pajak

C. Laporan Promosi Ekonomi Anggota (4 item)

1. Manfaat ekonomi dari pembelian/pengadaan jasa bersama.
2. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama.
3. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
4. Manfaat ekonomi dalam bentuk SHU.

D. Laporan Arus Kas (3 item)

1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

E. Catatan Atas Laporan Keuangan (13 item)

1. Perlakuan akuntansi
 - 1.1. Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
 - 1.2. Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap penilaian persediaan, piutang dan sebagainya.
 - 1.3. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota.
2. Pengungkapan informasi lainnya
 - 2.1. Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam AD / ART maupun dalam praktik, atau yang telah dicapai oleh koperasi.
 - 2.2. Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha,

manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota.

- 2.3. Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
- 2.4. Pengklasifikasian piutang dan utang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
- 2.5. Pembatasan penggunaan dan resiko atas aktiva tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.
- 2.6. Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi.
- 2.7. Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta.
- 2.8. Pembagian Sisa Hasil Usaha dan penggunaan cadangan.
- 2.9. Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan.
- 2.10. Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.